

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi adalah metode komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan melibatkan pemilihan kata dan kalimat, serta negosiasi antara perwakilan yang diakui untuk mencapai tujuan atau kepentingan kita sendiri (Partao, 2007). Namun, seiring berjalannya waktu, dunia ini menjadi semakin tak terbatas. Globalisasi mengantarkan era baru bagi diplomasi dimana format diplomasi mulai bergeser dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah dengan melibatkan pemerintah non-pusat dalam melakukan kebijakan luar negeri. Artinya, aktor yang berperan berada di sub-sistem negara yakni pemerintah daerah atau dikenal dengan istilah 'paradiplomasi' (Mukti, 2013). Paradiplomasi adalah fenomena baru dalam ilmu hubungan internasional yang mengacu pada perilaku dan kapasitas entitas 'sub-negara' untuk melakukan hubungan luar negeri dalam konteks kepentingan khusus mereka (Wolff, 2009).

Dengan munculnya paradiplomasi, hubungan antara kota satu dengan kota lain di dalam negara mulai berkembang menjadi kerjasama *sister city*. *Sister city* adalah sebuah gagasan di mana dua wilayah atau kota yang terpisah secara geografis, administratif, dan politik bekerja sama untuk membentuk hubungan sosial antar masyarakat dan budaya. Kerjasama *sister city* adalah kemitraan formal yang dibentuk oleh dua pemerintah kota dari negara yang berbeda (Liu & Hu, 2018). Dalam perkembangannya, istilah *sister city* sendiri lebih umum digunakan oleh Amerika Serikat dibanding Eropa yang mengenal *sister city* dengan sebutan *twin city*. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menggunakan istilah *sister city* yang mana mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Kerjasama *sister city* dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Selain itu, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing juga harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya manusia, serta potensi dan kebijakan pihak mitra asing (Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2019).

Kerjasama *sister city* yang terjalin ditandai dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau MoU oleh kedua belah pihak. Kota Semarang menjadi salah satu kota di Indonesia yang ikut serta melakukan kerjasama *sister city* dengan kota-kota dari negara lain. Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang telah menjalin kerjasama *sister city* dengan sejumlah kota di seluruh dunia. Kerjasama *sister city* di Kota Semarang dimulai sejak tahun 1993 yaitu dengan Kota Brisbane, Australia. Selain itu, Kota Semarang juga bekerja sama dengan kota-kota lintas negara lainnya seperti Beihai (Tiongkok), Netherland (Belanda), Fuzhou (Tiongkok), Split (Kroasia) dan Jung-Gu (Korea Selatan) (Satu Data Pemerintah Kota Semarang, 2016). Dari beberapa kerjasama tersebut, yang telah berjalan sampai ke tahap penandatanganan MoU adalah dengan Brisbane, Beihai, dan Jung-Gu (Putri, 2017).

Kerjasama antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu dimulai dengan menyepakati *Letter of Intent* (LoI) sebagai dasar untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas meliputi bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, budaya, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pelatihan profesional serta bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua pihak, sesuai peraturan yang berlaku di negara masing-masing pada tahun 2013 (Satu Data Pemerintah Kota Semarang, 2017). Namun kerjasama tersebut belum berjalan karena belum menentukan kebijakan teknis mengenai tindak lanjut kerjasama. Setelah tiga tahun berlalu, pada 25 November 2016, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berusaha untuk mewujudkan keseriusannya dalam menindaklanjuti dan merealisasikan kerjasama yang sebelumnya tertunda dengan mengunjungi Korea Selatan. Beliau mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Jung-Gu, Park Sung Min, yang menyambut baik kerjasama ini dengan harapan

dapat meningkatkan kesejahteraan di kedua kota. Pada pertemuan ini dihasilkan penandatanganan MoU antara Kota Semarang dan Kota Jung-Gu (a) Perencanaan kota dan infrastruktur perkotaan terutama jalan dan jembatan; (b) Pariwisata dan kebudayaan; (c) Ekonomi, perdagangan dan investasi; (d) Kesehatan; dan (e) Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan profesional. Kesepakatan kerjasama antara Kota Semarang dan Kota Jung-Gu ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun kedepan dengan melakukan pertemuan kelompok kerja secara berkala setiap tahun guna melakukan monitoring dan evaluasi (Kompas.com, 2016).

Pemerintahan Hendrar Prihadi pada tahun 2016 – 2021 sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk memajukan Kota Semarang. Hal ini sehubungan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005 - 2025 yang telah ditetapkan yaitu “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya” (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2017). Visi tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menjalin kerjasama *sister city* dengan Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan. Dalam perkembangannya, kerjasama diantara keduanya di bidang perencanaan kota dan infrastruktur perkotaan yang ditangani oleh Dinas Bina Marga menjadi satu-satunya kerjasama yang sempat berjalan. Namun kerjasama ini hanya berjalan sampai tahun 2018 dan akhirnya terhenti karena terpengaruh anggaran sehingga tidak bisa melakukan pertukaran staf tim Dinas Bina Marga untuk belajar lebih lanjut ke Jung-Gu (Ediati, 2021).

Kerjasama lain seperti di bidang perencanaan kota dan infrastruktur perkotaan yang ditangani oleh Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), kebudayaan dan pariwisata yang ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di bidang ekonomi perdagangan dan investasi yang ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di bidang kesehatan yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan Profesional belum berjalan. Sehingga adanya permasalahan ini menarik untuk diteliti agar dapat melihat mengapa kerjasama-kerjasama tersebut tidak berjalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan serta dianalisis dalam tulisan ini adalah: “Mengapa kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu belum berjalan sepenuhnya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan kendala kerjasama *sister city* yang dihadapi oleh aktor *sub state*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan alasan belum terpenuhinya kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan dan perkembangan akademik dalam bidang ilmu hubungan internasional terkait kendala kerjasama *sister city* yang terjadi antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kendala kerjasama *sister city* yang terjalin antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu, serta dapat menjadi referensi bagi praktisi, baik pengambil maupun pelaksana kebijakan terkait dengan kerjasama *sister city*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang secara khusus membahas kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu belum pernah dilakukan. Untuk itu, dipilih dua penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, yakni penelitian oleh E. N. Domloboy NST (2016), dengan judul “*Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon Tahun 1997-2015*” yang membahas kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Suwon. Penelitian ini tidak secara khusus membahas kerjasama antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu, namun pembahasan dan kerangka pemikiran dari penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran paradiplomasi dan interdependensi kompleks yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penghambat yang menyebabkan kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon tidak berjalan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kerjasama ini tidak berjalan karena kurang mendukungnya faktor sumber daya manusia, birokrasi dan anggaran. Sementara itu pada faktor eksternal terdapat krisis global yang terjadi di dua negara dan paradigma nasional yang mengatakan bahwa kerjasama *sister city* hanyalah sebuah seremonial.

Selanjutnya terdapat penelitian oleh Selvinda Novintan Putri (2017), yang berjudul “*Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Kota Beihai*”. Penelitian ini juga tidak secara khusus membahas *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu, namun memiliki subjek penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan konsep *sister city* untuk menganalisis kegagalan kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Beihai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada tindak lanjut setelah proses penandatanganan MoU pada tahun 2008 sehingga kerjasama terhenti. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama tersebut terhenti adalah tidak adanya inisiatif dari pihak Pemkot Semarang untuk menyumbangkan gagasan ide pada program keberlanjutan *sister city*. Sedangkan dari pihak Beihai adalah adanya faktor kebijakan dari kepemimpinan baru pada saat itu.

Penelitian penulis menggunakan dua konsep, yakni konsep paradiplomasi dan konsep *sister city*. Konsep paradiplomasi digunakan untuk menganalisis alasan kedua kota melakukan kerjasama secara lebih spesifik, dan konsep *sister city* digunakan untuk menganalisis kendala yang terjadi antara kedua kota. Adapun kerangka pemikirannya dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Konsep Paradiplomasi

Perkembangan hubungan internasional di dunia saat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh aktor negara, namun juga aktor non-negara seperti sub-negara (daerah), memainkan peran penting dalam pelaksanaan diplomasi. Adanya penguatan aktivitas sub-negara dalam hubungan internasional kemudian dikenal dengan istilah paradiplomasi. Pada tahun 1980-an, Panayotis Soldatos menciptakan istilah paradiplomasi yang merupakan gabungan dari kata *parallel diplomacy* (Soldatos, 1990). Dalam paradiplomasi aktor-aktor non-tradisional seperti kelompok, individu, organisasi, dan sub-negara mulai muncul sebagai pemain untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing (Mellisen, 1999: xv; Meerts, 2009: 90; Stefan, 2009: 1-2; dan David, 2008: 34).

Konsep paradiplomasi kemudian menjadi pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tantangan-tantangan dalam hubungan internasional yang dihadapi oleh aktor daerah. Ada tiga kategori paradiplomasi menurut Ivo Duchacek (1990): (a) *Transborder paradiplomacy*, mengacu pada hubungan kelembagaan formal dan informal antara pemerintah daerah di negara berbeda yang secara fisik berdekatan; (b) *Transregional paradiplomacy*, mengacu pada hubungan diplomatik antara pemerintah daerah di negara yang berbeda yang tidak berbatasan langsung, tetapi negara di mana kedua pemerintah masih berada di wilayah yang sama; (c) *Global paradiplomacy*, mengacu pada hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di banyak negara yang berbeda wilayah di seluruh dunia.

Selain itu, Andre Lecours (2008) menyatakan bahwa ada tiga jenis kepentingan dalam paradiplomasi, yaitu: (a) Kepentingan ekonomi dimana pemerintah daerah berharap dapat membangun kerjasama internasional di bidang ini untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pasar ekspor. Paradiplomasi disini berfokus pada perdagangan sehingga mengabaikan dimensi politik dan budaya karena lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi; (b) Paradiplomasi pada kerjasama yang lebih luas, yakni kerjasama diberbagai bidang. Paradiplomasi dalam konteks ini lebih besar dan beragam dimana tidak fokus pada kepentingan ekonomi saja tetapi juga bidang-bidang kerjasama yang lain. Kerjasama ini dapat dicapai dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk melaksanakan program *exchange of knowledge* seperti program pelatihan, pertukaran pelajar atau pertukaran budaya; (c) Paradiplomasi bermotif politik. Paradiplomasi dalam konteks ini lebih cenderung memasukkan kepentingan dalam menunjukkan identitas politik daerah. Entitas atau pemerintah daerah berusaha untuk menegaskan otonomi mereka sebagai entitas yang terpisah dari mayoritas wilayah negara mereka.

1.5.2 Konsep Sister City

Sister city merupakan hubungan kerjasama antara pemerintah kota di tingkat kabupaten, kota, dan administrasi dengan pemerintah kota di negara lain. Hubungan kerjasama *sister city* harus memiliki program kegiatan yang ditetapkan dan direncanakan, baik dari segi wilayah yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontribusi biaya masing-masing pihak, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kegiatan kerjasama (Jatmika, 2001). Konsep *sister city* sendiri berkembang atas dukungan mantan Presiden AS Dwight D. Eisenhower yang mengusulkan program *people-to-people* pada konferensi Gedung Putih pada tahun 1956. Program ini bertujuan untuk mengikutsertakan individu dan masyarakat dalam pelaksanaan diplomasi dengan harapan dapat menjalin ikatan antar individu melalui kerjasama *sister city*, yang dapat meminimalisir kemungkinan perang antar negara di masa depan (Hepler, 1994).

Menurut Nigel Ringrose, seorang ahli dari UNDP (United Nations Development Programme) yang mempresentasikan tentang “*The Challenges of Linking: C2C Cooperation as a Development Modality for the 21st Century*” dalam Tjandradewi & Marcotullio (2009), terdapat lima elemen penting yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kerjasama antar kota: (a) Komitmen kedua pihak dalam kerjasama, yang dapat dilihat dari bagaimana kedua pihak memberikan upaya, waktu dan sumber daya, baik itu manusia maupun finansial untuk menjalin kerjasama; (b) Partisipasi masyarakat dalam kerjasama, dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Aspek terpenting dari elemen ini adalah adanya hubungan yang lebih dalam antar masyarakat sipil dari masing-masing kota daripada antar pejabat pemerintah daerahnya; (c) Pemahaman bersama antara kedua pihak, Ketika kedua kota membuat perjanjian kerjasama, masing-masing pihak harus saling memahami dan menyepakati jadwal kerjasama serta hasil/*outcomes* yang diharapkan dalam kerjasama. Pemahaman ini dituangkan dalam kesepakatan tertulis seperti *Memorandum of Understanding* atau melalui kontak dan diskusi yang konsisten; (d) Hubungan timbal balik antar kota, semua pihak yang terlibat dalam kerjasama harus memberikan dan menerima manfaat yang sama dan menunjukkan tanggung jawab untuk mengembangkan bidang-bidang yang telah disepakati; dan (e) Hasil nyata dari kerjasama, dapat berupa perubahan lunak yaitu hasil dari latihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan keras yaitu contoh proyek yang berhasil dikerjakan, seperti infrastruktur.

Konsep *sister city* diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis apakah konsep dasar dari *sister city* yakni *people to people* diterapkan pada kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu. Selain itu konsep ini juga diharapkan dapat menganalisis apakah kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu memenuhi elemen-elemen penting yang diperlukan untuk menilai mengapa kerjasama ini tidak berjalan.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah asing maupun aktor non daerah untuk mencapai kepentingan ekonomi, budaya, pendidikan dan infrastruktur (Kuznetsov, 2015).

1.6.1.2 *Sister City*

Sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang terjalin antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri dengan memperhatikan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kerjasama antar kota seperti komitmen kedua pihak dalam kerjasama, partisipasi masyarakat dalam kerjasama, pemahaman bersama antara kedua pihak, hubungan timbal balik antar kota, dan hasil nyata dari kerjasama (Tjandradewi & Marcotullio, 2009).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi dalam penelitian ini berfokus meninjau kepentingan Kota Semarang dalam melakukan kerjasama *sister city* dengan Kota Jung-Gu di bidang perencanaan perkotaan dan infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, ekonomi perdagangan dan investasi, serta pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

1.6.2.2 *Sister City*

Sister city dalam penelitian ini digunakan untuk mencari kendala kerjasama *sister city* yang dihadapi oleh Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu dari tahun 2016-2021 dengan mengkaji apakah kerjasama diantara keduanya memenuhi lima elemen penting yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kerjasama antar kota seperti komitmen kedua pihak dalam kerjasama, partisipasi

masyarakat dalam kerjasama, pemahaman bersama antara kedua pihak, hubungan timbal balik antar kota, dan hasil nyata dari kerjasama.

1.7 Argumentasi Penelitian

Faktor yang menjadi kendala kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Jung-Gu banyak yang belum berjalan adalah karena Pemerintah Kota Semarang mengabaikan elemen penting yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kerjasama antar kota seperti komitmen kedua pihak dalam kerjasama, partisipasi masyarakat dalam kerjasama, dan hubungan timbal balik antar kota.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodenya. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dikembangkan dalam ilmu sosial yang memungkinkan para peneliti untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya (Denzin & Lincoln, 2018).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Given (2008), tipe penelitian eksplanatif adalah tipe penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan alasan kerjasama *sister city* antara Kota Semarang dan Kota Jung-Gu belum berjalan di beberapa bidang.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi sosial yang mencakup pelaku, tempat, dan kegiatan untuk dilakukan pengamatan (Nasution, 2003). Penelitian ini berfokus pada Kota Semarang dengan melakukan wawancara ke Pemerintah Kota Semarang, khususnya Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang, serta dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP).

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah partisipan terpilih yang paling bisa menjawab pertanyaan penelitian dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Sargeant, 2012). Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang yakni Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang dan dinas-dinas yang terlibat dalam kerjasama *sister city* Kota Semarang dan Kota Jung-Gu.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Kabir (2016) jenis data disusun dalam dua kategori besar, yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif di mana sebagian besar bersifat non-numerik dan biasanya deskriptif yang berarti datanya dikumpulkan dalam bentuk kata dan kalimat (Kabir, 2016).

1.8.5 Sumber Data

Menurut Ajayi (2017), sumber data secara umum dibagi berdasarkan siapa yang mengumpulkan data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh peneliti sementara data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan atau diproduksi oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Sementara untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (Kabir, 2016). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemerintah Kota Semarang, khususnya dengan staf Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang, Sub-bagian Kerjasama Luar Negeri yakni Ibu Rizki Pranata Paramita. Bappeda dengan Bapak Ismet Adipradana, Dinas Bina Marga dengan Ibu Murni Ediati, DTKP dengan Ibu Transiska Luis Marina. Adapula data tambahan yang diperoleh dari wawancara Kepala SMP 2 Semarang dengan Bapak Siminto dan wawancara dengan mantan staf Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang, Dhamayantie Savitrie. Sementara data sekunder diperoleh dari studi

pustaka seperti buku, laporan, data arsip Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang, jurnal dan artikel internet.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengidentifikasi data ke dalam beberapa kategori, menyusun ke dalam pola, memilih data mana yang relevan dan penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri serta orang lain.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis kredibilitas dan keaslian dari hasil penelitian (Denzin dan Lincoln, 1994). Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Semarang dan dinas-dinas terkait yang menangani kerjasama ini secara langsung dari tahun 2016 – 2021. Sehingga kualitas data yang diperoleh adalah data kredibel dari sumber terpercaya sesuai dengan periode fenomena.